

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI KEPENDUDUKAN DIGITAL

STRATEGY FOR ACHIEVING POPULATION DIGITAL ACTIVATION TARGET

Aprilla Intan Fatima*, Sri Wibawani

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur

*Koresponden email: aprillaintanf@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi IKD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selaku pemanfaat aplikasi IKD. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi IKD berada pada posisi *comparative advantage*, dilihat dari analisis SWOT Albert Humprey yang didalamnya terdapat 4 faktor utama, sebagai berikut: 1) *Strengths*, kegiatan aktivasi IKD lancar karena didukung oleh tangguhness struktur organisasi, komitmen pegawai, kualitas sumber daya manusia, keamanan data terjamin, dana digunakan secara efisien, dan lokasi strategis; 2) *Weaknesses*, adapun kelemahan yang berasal dari sistem jaringan aplikasi IKD belum dapat diatasi oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo; 3) *Opportunity*, kesempatan dikemas dengan baik dalam bentuk kegiatan *Goes To School* dan *Jemput Bola Terpadu*; 4) *Threats*, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, menghadapi masyarakat gagap teknologi, dan sedikitnya lembaga pengguna IKD. Penelitian ini diharapkan menjadi temuan baru bahwa masih terdapat kelemahan sistem jaringan pada aplikasi IKD yang dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dan menjadi perhatian peneliti untuk dapat melakukan penelitian mengenai kelemahan system jaringan aplikasi IKD.

Kata kunci: Identitas kependudukan digital, kebijakan publik, manajemen strategi

ABSTRACT

This research aims to determine the strategic management of the Sidoarjo Regency Dukcapil as an effort to increase the achievement of IKD activation targets. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The research informants were the Population Administration Information Management Division (PIAK) of the Sidoarjo Regency Dukcapil and the people of Sidoarjo Regency as the users of IKD. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques are through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research explain that the strategy of the Sidoarjo Regency Dukcapil as an effort to increase the achievement of IKD activation targets is in a comparative advantage position, seen from Albert Humphrey's SWOT analysis, which contains 4 main factors, as follows: 1) Strengths, activation activities IKD runs smoothly because it is supported by a strong organizational structure, employee commitment, quality human resources, guaranteed data security, funds used efficiently, and strategic location; 2) Weaknesses, the weaknesses originating from the IKD application network system have not been able to be overcome by the Sidoarjo Regency Dukcapil Office; 3) Opportunity, the opportunity is packaged well in the form of Integrated Goes To School and Jemput Bola activities; 4) Threats, need to increase public awareness, facing technologically savvy people, and the small number of IKD user institutions. This research is expected to be a new finding that there are still weaknesses in the network system in the IKD application which can be of concern to the government to overcome this and become the attention of researchers to be able to conduct research on the weaknesses of the network system of the IKD application.

Keywords: Digital population identity, public policy, management strategy

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), sebagai sistem, administrasi kependudukan diharapkan dapat memberikan hak administratif masyarakat dalam pelayanan publik untuk menerbitkan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi bersamaan dengan peran aktif pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggara-

kan urusan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang juga dikenal sebagai Disdukcapil (Damayanti, 2022). Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Salah satu dokumen kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dihasilkan

dari layanan adminduk yang diselenggarakan oleh disdukcapil kabupaten atau kota sebagai instansi pelaksana layanan adminduk (Rudiansyah et al., 2021), termasuk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan KTP-el saat ini merupakan bagian dari upaya Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung akurasi database kependudukan yang dibangun di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Herawan & Meisa Dai, 2021). Menurut (Waworundeng, 2020), pada akhir 2012, diperkirakan setidaknya 172 juta orang di Indonesia memiliki KTP-el. Selanjutnya, dari awal hingga akhir tahun 2013, perekaman data penduduk akan berlanjut sampai seluruh warga negara Indonesia memiliki KTP-el (Hadiyanor & Widayanti, 2021).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Rata-Rata
Tarik	33.639	33.157	66.796
Prambon	39.090	38.282	77.372
Krempung	33.812	33.835	67.647
Porong	35.323	34.791	70.114
Jabon	27.541	27.274	54.815
Tanggulangin	43.274	43.104	86.378
Candi	75.648	75.619	151.267
Sidoarjo	97.180	98.861	196.041
Tulangan	49.729	49.525	99.254
Wonoayu	41.482	40.869	82.351
Krian	64.912	63.508	128.420
Balombangendo	37.032	36.143	73.175
Taman	99.867	99.477	199.344
Sukodono	60.491	59.405	119.896
Buduran	48.890	48.742	97.632
Gedangan	58.675	58.359	117.034
Sedati	47.137	46.797	93.934
Waru	95.751	97.815	193.566
Total	989.473	985.563	1.975.036

Berdasarkan data dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2022 mencapai 1.975.036 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 656.906 KK. Dengan jumlah penduduk yang tergolong tidak sedikit, tentu banyak masyarakat yang memerlukan KTP-el (Rusdia, 2019). Menurut data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2023, jumlah antrian blangko hingga tanggal 31 Juli 2023 mencapai 19.000 tunggu cetak. Angka ini tercatat sejak bulan Maret hingga saat ini. Kebutuhan cetak setiap hari berkisar antara 1.000 sampai 2.000 blangko, sedangkan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo hanya menerima kuota 500 blangko dari Kemendagri. Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa blangko KTP-el yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo belum bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Menurut Bapak Drs. Reddy Kusuma, MA, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, jumlah

blangko KTP-el dari Kemendagri masih terbatas karena sedang melakukan proses pengadaan. Keterbatasan blangko KTP-el disebabkan oleh pasokan KTP-el yang tidak seimbang dengan permintaan warga Kabupaten Sidoarjo yang terus meningkat. Namun, keterbatasan blangko KTP-el tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo saja, tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia (Puspita Ningrum & Sukmana, 2022).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa meskipun blangko e-KTP terbatas, masyarakat yang ingin mengurus KTP-el tidak perlu khawatir. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan secara menyeluruh, Disdukcapil Sidoarjo memberikan solusi berupa aktivasi KTP digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan melalui gawai sebagai identitas yang relevan (Rahmanul, 2023). Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital telah mengatur hal ini. IKD memiliki beberapa manfaat, antara lain: (1) Pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif, dan efisien; (2) Menghemat sekitar 200 hingga 400 milyar rupiah per tahun untuk pengadaan blangko KTP-el, pita, film, dan perlengkapan lainnya; (3) Tidak perlu bergantung pada vendor karena dikembangkan sendiri oleh Ditjen Dukcapil; (4) Tidak memerlukan anggaran khusus untuk membangun sistem identitas kependudukan digital; dan (5) Mengurangi biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena menghilangkan peran middle man (Permadi & Rokhman, 2023).

Di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, aktivasi IKD ditargetkan mencapai sebesar 25% dari total jumlah penduduk (Widiyarta et al., 2023). Data terbaru menunjukkan bahwa 60.387 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo telah melakukan aktivasi IKD, setara dengan sekitar 4% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo belum mencapai target aktivasi IKD hingga akhir tahun 2023, yang mana pengguna IKD harus mencapai 75 ribu jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo. Walaupun demikian, menurut Bapak Dr. Reddy Kusuma, MA, Kota Delta ini menempati peringkat ketiga dalam kategori jumlah pengguna IKD terbanyak di Jawa Timur, setelah Surabaya dan Banyuwangi. Hingga akhir tahun ini, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berencana untuk terus melakukan upaya aktivasi IKD hingga mencapai 75 ribu warga. Tahun depan, aktivasi IKD ditargetkan dapat mencapai 150 hingga 200 ribu warga.

Untuk mencapai angka 150 hingga 200 ribu pengguna IKD di tahun 2024 tentu bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus ditempuh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo adalah mengidentifikasi apa saja faktor yang menghambat pencapaian target dari kegiatan aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo (Nurzanah & Arif, 2023). Munculnya fakta bahwa banyak layanan publik, baik pemerintah maupun swasta, yang masih belum memanfaatkan IKD adalah salah satu faktor penghambat pencapaian target dari kegiatan aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo (Riska et al., 2023). Apabila seluruh layanan publik, baik pemerintah maupun swasta, sudah memanfaatkan IKD, maka minat masyarakat akan lebih besar untuk melakukan aktivasi IKD (Hardiyanti & Widiyarta, 2023).

Agar strategi penertiban gelandangan terbentuk, Keputusan walikota diperlukan sebagai pelengkap dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis (Salama, 2020). Selain itu, Disdukcapil Kota Bandung dapat bekerja sama dengan pihak lain, sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kependudukan lainnya bisa dilakukan secara konsisten. Penelitian serupa dilakukan oleh (Heriawan, 2021) dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Pelayanan Prima di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa untuk mencapai pelayanan prima, maka Disdukcapil memiliki strategi berikut: (1) Dimensi sikap (*attitude*) melakukan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai; (2) Dimensi perhatian (*attention*) menyediakan kotak saran dan nomor call center; (3) Dimensi tindakan (*action*) membuka mall pelayanan public (lotte Cikarang); (4) Dimensi kemampuan (*ability*) melakukan pendidikan pelatihan kepada para pegawai Disdukcapil; (5) Dimensi penampilan (*appearance*) membuat ruang laktasi dan taman bermain anak; dan (6) Dimensi tanggung jawab (*accountability*) melakukan pelayanan one day one service.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital dengan analisis *SWOT* yang dikembangkan oleh Albert Humprey, dikutip dari (Mayang et al., 2020.) yang terdiri dari 4 faktor utama yang mempengaruhi penyusunan strategi, antara lain: (1) *Strengths* (Kekuatan); (2) *Weaknesses* (Kelemahan); (3) *Opportunity* (Peluang); dan (4) *Threats* (Ancaman/Tantangan). Berdasarkan analisis *SWOT*, apabila organisasi memiliki peluang dan memiliki kekuatan untuk menangkap peluang tersebut, maka strategi organisasi tersebut berada pada posisi *comparative advantage* atau organisasi lebih cepat berkembang. Apabila organisasi memiliki peluang dan kelemahan, sementara

organisasi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menangkap peluang tersebut, maka strategi organisasi tersebut berada pada posisi *divestment* (membiarkan peluang pergi)/*investment* (menangkap peluang).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebab peneliti mengeksplorasi pendapat beberapa individu mengenai permasalahan social (Heriyanto & Mujiarti Ulfah, 2022). Data yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan penjelasan lebih rinci yang disesuaikan dengan data dan fakta di lapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan berupa purposive sampling, yakni teknik menentukan sampel dari populasi dengan pertimbangan tertentu (Lenaini, 2021), dan snowball sampling sebagai salah satu bentuk teknik penentuan informan yang sangat tepat digunakan bila populasinya kecil dan spesifik (Chan et al., 2019). Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan key informan, antara lain Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selaku pemanfaat aplikasi IKD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut strategi disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam mengupayakan peningkatan pencapaian target aktivasi IKD berdasarkan analisis *SWOT* Albert Humprey dikutip dari (Mayang et al., 2020), yang terdiri atas 4 faktor utama yang mempengaruhi penyusunan strategi sebagai pisau analisis untuk penelitian ini:

Strengths (Kekuatan)

Kemampuan internal yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya dikenal sebagai kekuatan (Adiwilaga et al., 2023). Apabila cukup, kekuatan dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan menangkap peluang. Kekuatan memiliki kemampuan untuk mencegah ancaman. Selama kegiatan aktivasi IKD, terdapat beberapa kemampuan internal Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang dapat mendukung proses perencanaan strategis.

Visi dan misi, berdasarkan portal website (<https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/>), Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu visi misi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Ber-

karakter, dan Berkelanjutan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Kegiatan aktivasi IKD yang terus dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah yang tepat untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut.

Struktur organisasi, sistem yang mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dan membantu mencapai tujuan masa depan. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang pelayanan publik. Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo



Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang terampil dalam menangani tugas. Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan pelayanan publik. Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dinilai mampu dan menguasai pengetahuan tentang sistem informasi kependudukan, keterampilan pengelolaan data, dan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Namun, tidak dipungkiri bahwa pegawai yang berkualitas memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan tanggung jawab. Kualifikasi pendidikan dan tanggung jawab pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	8
2	Strata 1 (S-1)	50
3	Diploma III	12
4	SLTA	16
	Total	86

Dana alokasi khusus yang dikelola Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan termanfaatkan dengan baik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara bersama Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT, anggota Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, bahwa dana alokasi khusus yang diberikan dari Ditjen Dukcapil sudah digunakan se-efisien mungkin sesuai dengan kebutuhan aktivasi IKD, misalnya biaya transportasi saat kegiatan jemput bola.

Lokasi strategis pada kegiatan aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dinilai mempermudah masyarakat dengan meminimalisir biaya transportasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan IKD. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang mana mengatakan bahwa pada tahun ini, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mencoba memberikan solusi pada masyarakat agar tidak terlalu jauh dalam mengakses IKD. Saat ini terdapat 21 titik pelayanan IKD mulai dari Kantor Dukcapil Sidoarjo, MPP Lingkar Timur, Mini MPP Sukodono, dan 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat pengguna IKD, yakni Saudara Savira Amalia mengatakan bahwa akses layanan IKD di Kabupaten Sidoarjo sangat mudah karena sudah tersedia di kecamatan terdekat. Semua informasi mengenai pelayanan IKD sudah tersedia secara lengkap di akun Instagram @disdukcapilsidoarjo. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui media sosial. Beberapa tempat yang disediakan tersebut dirancang agar masyarakat lebih mudah berkomunikasi dan melakukan transportasi.

Fitur keamanan aplikasi IKD dapat dikatakan sudah sangat baik. Untuk memastikan bahwa IKD memiliki keamanan yang berlapis, proses registrasi IKD menggunakan NIK, foto selfie, dan kode QR. Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, Bapak Bambang Purnomo, S.Kom., M.H., menyatakan pada sesi 40 Dukcapil Sapa Masyarakat bahwa sejak peluncurannya, aplikasi IKD telah berintegrasi dengan sistem ECU. Aplikasi IKD memiliki *cyber security*, sehingga semua data yang disimpan akan dilindungi.

Menurut pendapat Saudara Salma Zahrania, aplikasi IKD tidak dapat dengan mudah diakses oleh orang lain karena kata sandi hanya diketahui oleh pemilik IKD. Sehingga data tidak akan mudah dibajak karena semua data akan dienkripsi. Selain itu, sistem one account one phone membuat IKD sulit diduplikasi. Ditjen Dukcapil juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memiliki kelompok yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan system.

Weaknesses (Kelemahan)

Setiap organisasi pasti memiliki kelemahan, hal yang harus dilakukan adalah perbaikan untuk mengurangi kelemahan atau mengubah kelemahan menjadi kekuatan (Rudy & Prasetya, 2018). Adapun kelemahan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan aktivasi IKD, yakni kelemahan yang berasal dari sistem jaringan aplikasi IKD. Sesuai dengan kemajuan teknologi,

layanan IKD terus diperbarui. Meskipun sudah diakses oleh masyarakat, sepertinya masih terdapat kelemahan yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya adalah sistem jaringan layanan IKD yang biasanya lama ketika masyarakat hendak mengakses aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan oleh sistem jaringan terpusat yang terkadang mengalami error.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pengguna IKD, Saudara Salma Zahrania, mengatakan bahwa jaringan IKD sangat sulit diakses. Pernyataan tersebut disepakati oleh saudara Savira Amalia yang mengatakan bahwa jaringan IKD yang biasanya lemot dapat menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat yang sedang memanfaatkan layanan IKD harus lebih sabar untuk dapat menggunakannya. Sejauh ini, banyak masyarakat yang dapat mengakses karena praktis, namun sistem jaringan layanan tersebut dapat menghalangi siapapun yang menggunakannya.

Opportunity (Peluang)

Peluang tidak datang secara kebetulan, tetapi harus dicari dan dikejar, sehingga di kemudian hari ancaman atau tantangan dapat dihindari (Saputri, 2021). Salah satu tanggung jawab penting bagi organisasi publik adalah mencari peluang. Pada acara Dukcapil Sapa Masyarakat sesi 40, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa strategi kegiatan aktivasi IKD sudah memasuki tahap 4, sebagai berikut:

Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, percobaan pertama aktivasi IKD pada Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan berhasil. Inisiatif ini sebagai bentuk partisipasi aktif pegawai dalam tahap uji coba. Hal ini menunjukkan komitmen pegawai untuk mengadopsi teknologi terkini guna meningkatkan dan memperbarui sistem kependudukan di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan aktivasi IKD. Dengan dilakukannya kegiatan ini, dapat membuktikan bahwa ASN di Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memperkuat integritas data, meningkatkan keamanan informasi, dan memastikan keakuratan identitas dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki identitas digital yang valid dan terverifikasi, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mengambil inisiatif proaktif untuk melakukan aktivasi IKD di perguruan tinggi. Melalui

kegiatan ini, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan data mahasiswa serta memberikan akses yang lebih cepat dan efektif ke layanan digital kampus. Dengan melakukan kegiatan ini, harapannya dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya, serta mendukung pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa.

Masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk membawa solusi identitas digital ke masyarakat melalui program aktivasi IKD. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberi akses yang lebih mudah dan aman ke berbagai situs web, meningkatkan perlindungan data, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai transaksi digital. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih terhubung dan maju di era internet dengan kegiatan aktivasi IKD. Untuk melakukan sosialisasi mengenai aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan.

Kegiatan aktivasi IKD yang berhasil dilaksanakan diseluruh puskesmas di Kabupaten Sidoarjo dan perusahaan swasta, seperti Bank Jatim dan PT. Megasurya Mas pada tahun 2023 merupakan langkah maju menuju penerapan teknologi terkini dalam manajemen data kependudukan. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan swasta PT. Megasurya Mas, yakni Bapak Rio mengatakan bahwa kegiatan aktivasi IKD yang diadakan di Perusahaan swasta sangat membantu karyawan yang tidak memiliki waktu untuk datang ke Disdukcapil. Harapannya, inisiatif ini akan meningkatkan jaringan *public private partnership* dalam memberikan dukungan yang baik untuk pengelolaan identitas digital.

Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan bangga meluncurkan program aktivasi IKD di SMA dan SMK wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan ini, perekaman KTP akan dilakukan bersamaan dengan aktivasi IKD. Kegiatan ini akan memberi siswa kesempatan untuk lebih mendekatkan diri dengan teknologi sambil membuat data identitas kependudukan lebih mudah diakses di era digital. Kolaborasi antara pemerintah dan sekolah akan menghasilkan peningkatan pencapaian target aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan semangat kerja sama, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga melakukan aktivasi IKD di setiap kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya IKD, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo datang ke setiap kelurahan melalui kegiatan Jemput bola terpadu Sidoarjo yang gemilang (JEBETE SAYANG). Dengan cara ini, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses aktivasi IKD, dengan menjadikan setiap kelurahan sebagai pusat

kegiatan. Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya tercermin dalam jumlah aktivasi yang tinggi, tetapi juga dalam meningkatkan solidaritas dan keterlibatan masyarakat dalam mengadopsi teknologi kependudukan digital.

Salah satu inovasi penting adalah menjadikan IKD sebagai sebuah syarat dalam proses pengambilan adminduk di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo membiasakan masyarakat untuk memanfaatkan IKD dalam menggunakan pelayanan publik. Memanfaatkan inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi waktu masyarakat karena tidak perlu melalui antrean panjang untuk mendapatkan dokumen kependudukan, cukup menunjukkan IKD.

Beberapa kegiatan aktivasi IKD yang dikemas dengan cara yang dapat menarik perhatian masyarakat menempatkan Kabupaten Sidoarjo pada posisi ketiga dengan pengguna IKD terbanyak di Jawa Timur dengan total 60 ribu pengguna pada tahun 2023, di bawah Surabaya dan Banyuwangi. Berikut data perolehan IKD dari Januari hingga September 2023:

Tabel 3. Capaian Aktivasi IKD Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	1403
2	Februari	4119
3	Maret	2985
4	April	1604
5	Mei	4275
6	Juni	4316
7	Juli	7137
8	Agustus	7514
9	September	6580

Menurut portal website (<https://radarsidoarjo.jawapos.com/>), Bapak Dr. Reddy Kusuma, MA, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa target pencapaian kegiatan aktivasi IKD pada tahun 2024 adalah 150 hingga 200rb. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT selaku anggota Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa rencana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada seluruh kelurahan di Kabupaten Sidoarjo mengenai layanan IKD. Harapannya, manfaat yang didapatkan oleh seluruh kelurahan dari kegiatan BIMTEK dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Pada akhir tahun 2023, aplikasi IKD menyediakan 8 layanan dari yang sebelumnya hanya menyediakan 2 layanan. Layanan IKD yang memiliki perkem-

bangun dari tahun ke tahun mengharuskan bimbingan teknis segera dilaksanakan. Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT selaku anggota Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa rencana BIMTEK pasti dapat membuat masyarakat berminat untuk melakukan aktivasi IKD. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo peduli kepada masyarakat yang masih jauh menjangkau kecamatan. Apabila BIMTEK terlaksana, aktivasi IKD bisa diakses di Kelurahan.

Threats (Ancaman/Tantangan)

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, organisasi pasti dihadapkan dengan sebuah ancaman atau tantangan, begitu pula yang dirasakan oleh organisasi bidang adminduk. Ancaman atau tantangan yang muncul pada satu titik waktu tidak selalu merupakan ancaman yang muncul di kemudian hari (Irfani et al., 2021). Adapun ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan aktivasi IKD.

Tingkat kesadaran masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Identitas Kependudukan Digital dapat menjadi pendamping KTP-el, mengingat keterbatasan blangko KTP-el masih terjadi hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang, sehingga Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo akan terus mengenalkan manfaat IKD dalam kegiatan jemput bola agar masyarakat tertarik untuk melakukan aktivasi IKD.

Masyarakat yang gagap teknologi, aturan baru yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo pada sistem pengambilan adminduk di Mall Pelayanan Publik memungkinkan akan terasa sulit bagi pemohon yang sudah lansia maupun masyarakat yang gagap teknologi. Hal ini merupakan salah satu kendala yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi hambatan IKD dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan tersebut disetujui oleh Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT, beliau mengatakan bahwa kendala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo itu terdapat di masyarakat, terutama masyarakat yang belum mengenal teknologi. Tetapi Masyarakat tidak perlu khawatir karena pegawai pelayanan IKD pasti akan mengarahkan. Masyarakat akan diarahkan dari registrasi sampai aktivasi.

Lembaga pengguna IKD yang sedikit, dalam mengenalkan IKD kepada masyarakat, organisasi publik tentu perlu melakukan kerja sama dengan organisasi publik lain maupun swasta. Namun dalam pelaksanaannya juga bukan merupakan hal

yang mudah. Hal ini merupakan kendala yang dialami oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, yakni sedikitnya jumlah organisasi pelayanan publik pengguna IKD. Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom, MT menyampaikan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa lembaga yang sudah menggunakan IKD sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Bandara Juanda. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga sempat bekerja sama dengan Bank Jatim. Untuk selanjutnya, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo akan mengusahakan untuk bekerja sama dengan banyak lembaga.

Berdasarkan observasi dan wawancara, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo termasuk ke dalam organisasi yang berada pada posisi comparative advantage dalam strateginya untuk dapat mencapai target aktivasi IKD. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki pondasi kekuatan yang kokoh dimulai dari kebijakan hingga sumber daya yang ada pada internal organisasi. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga merupakan organisasi yang dapat memanfaatkan peluang dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang mana meraih posisi ketiga dengan pengguna IKD terbanyak se-Jawa Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang diuji melalui analisis *SWOT* yang terdiri atas 4 faktor utama yang mempengaruhi penyusunan strategi, strategi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam mengupayakan peningkatan pencapaian target aktivasi IKD dapat dikatakan berada pada posisi *comparative advantage*. Pertama, kekuatan internal Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mampu digunakan untuk menangkap peluang dan mengatasi ancaman, namun tidak dapat memperbaiki kelemahan. Kedua, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mengurangi kelemahan ataupun mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ketiga, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam menangkap dan memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan. Keempat, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat menghadapi ancaman atau tantangan dengan cara mengunggulkan kekuatan internal yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R., Ummah Mustofa, M., & Permana, K. E. (2023). *Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung*.

- Agustina Hardiyanti, K., & Widiyarta, A. (2023). Online Integrated Service Application Program Innovation. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 4). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student FKIP Universitas Jambi 2,3) PGSD FKIP Universitas Jambi. In *Jurnal Pendas Mahakam* (Vol. 4, Issue 2). Desember.
- Ditha Alvira Damayanti, Neneng Yani Yuningsih, & Idil Akbar. *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Masa Peralihan Layanan Tahun 2021 Di Kota Bandung*. (2022).
- Hadiyanor, E., & Widayanti, F. (2021). Kualitas Pelayanan E-KTP (Studi Pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *JPP: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 127–132. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Herawan, H., & Meisa Dai, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung* (Vol. 4, Issue 1).
- Heriawan Abdullah Kunta & Rina Susanti Hartono. *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Pelayanan Prima Di Kabupaten Bekasi*. (2021).
- Heriyanto, N., & Mujiarti Ulfah, S. (2022). *Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Publik* (Vol. 8, Issue 2). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). Model Analisis Swot Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Online Single Submission (Oss) Pada Dpmpstsp Provinsi Jawa Timur Swot Analysis Model Of Online Single Submission (OSS) Service Quality Improvement In

- DPMPTSP East Java Province. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1).
- Lenaini, I., & Artikel, R. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak*. 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Mayang, A., Astuti, I., & Ratnawati, S. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). In *Anissa Mayang Indri) Jurnal Ilmu Manajemen* (Vol. 17, Issue 2).
- Nurzanah, R. I., & Arif, L. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Strategy For Empowerment Of Seaweed Farming Communities. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 4). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Puspita Ningrum, A., & Sukmana, H. (2022). Analysis Of Improving The Quality Of E-KTP Population Services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 18. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i0.1223>
- Rahmanul, Meyzi Heriyanto, & Adianto. *Sustainability Innovation Dalam Penerapan E-Government Sustainability Innovation In Implementing E-Government*. (2023). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Riska, R., Aprilia, V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 2023(19), 645–650. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>
- Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantini, K. (2021). *Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil*. 18(4), 2021–2513. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Rudy, R., & Prasetia, A. M. (2018). SWOT Analysis And Tows Matrix E-Government On Tana Tidung City Of Kalimantan Utara. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 3(1), 46–51. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v3i1.19518>
- Rusdia, U. (2019). *Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*.
- Saputri, O. B. (2021). *Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan*. 3, 482–494. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/NOVASI>
- Waworundeng, W., & Revlie Pihoh, N. (2020). *Sam Ratulangi Development Resources Management Review Penerbit: Pelayanan Administrasi Kependudukan: studi pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara*.
- Widiyarta A & Humaidah I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya Agus Widiyarta, Isni Humaidah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Yusuf Salama, T. (2020). *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Studi Tentang Dokumen Kependudukan Gelandangan Dan Pengemis*.